

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Andi Hamzah, **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005

Aziz Syamsuddin. **Tindak Pidana Khusus**, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Alfitra. **Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP**. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadilah. **Tindak Pidana Korupsi: Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum**. Bandung: Refika Aditama. 2008

Chazawi, Adami, **Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Cetakan ke-1. Bandung: PT Alumni. 2006

Ermansyah Djaja. **Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009**. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Effendy, Marwan, **Korupsi dan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan**. Cetakan Pertama, Jakarta: Referensi. 2013

Frans Maramis. **Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia**, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Hermien Hadiati Koeswadji. **Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994

H. Helwi Danil. **Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya.**

Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014: Penerbit Rineka Cipta.2002

Kristian, Yopi. **Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara**

Hukum Nasional dan The United Nations Convention Againsts Corruption

(UNCAC), Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Lilik Mulyadi, **Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses**

Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999), Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000

Mahrus, Ali, **Hukum Pidana Korupsi di Indonesia**, Cetakan pertama, Yogyakarta:

UII Press. 2011

Moljatno. **Asas-Asas Hukum Pidana.** Cetakan ke-7. Jakarta.2012

Monang Siahaan, **Pembaruan Hukum Pidana Indonesia**, Cetakan Pertama, Jakarta:

PT Grasindo. 2016.

Patiro, Yopie Morya Immanuel, **Direksi Pejabat Publik dan Tindak Pidana**

Korupsi, Cetakan pertama, Bandung: CV Keni Media.2012

Ompusunggu, Tumbur. **Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam**

Penegakan Hukum di Indonesia. Cetakan pertama. Yogyakarta. Penerbit

Total Media. 2012.

Rohi. **Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi**, Depok, Pena Multi Media, 2008.

R. Wiyono, **Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana**

Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Saleh, Roeslan, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana**. Cet III. Jakarta: Aksara Baru, 2012

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

Adi Suhendra, **Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pidana bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi**, 2012

Eky Putri Larasati, **Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013

Yudhistira Gilang Permana, **Analisis Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang (Studi Putusan PN No.432 Pid/Sus/2014/PN.Gns)**, 2016

Internet

[http://international.sindonews.com/read/2013/12/03/40/812655/indonesia-ranking-](http://international.sindonews.com/read/2013/12/03/40/812655/indonesia-ranking-114-negara-terkorup-di-dunia)

[114-negara-terkorup-di-dunia](#) diakses terakhir hari Sabtu (14 Oktober 2017)

pada pukul 09.00.

http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada (28 Oktober

2017)